

DIGITALISASI DOKUMEN DAN PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA

Aan Zainul Anwar^{1*} dan Fatchur Rohman²

¹Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Indonesia
Jl Taman Siswa, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia

²Program Akuntansi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Indonesia
Jl Taman Siswa, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia

*Email: aanza@unisnu.ac.id

Abstrak

Artikel ini adalah hasil dari pengabdian masyarakat yang bertujuan mendigitalkan layanan administrasi desa dan sistem serta manajemen layanan administrasi. Objek mitra layanan adalah Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Tahap layanan adalah melakukan pengamatan dan wawancara di desa-desa mitra yang dilakukan oleh tim yang mengusulkan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM dalam bahasa), mengamati dan memetakan kebutuhan dan penggunaan administrasi desa. Hasil pengamatan pelaksanaan pemerintahan desa masih manual dan ada yang sudah menggunakan komputer. Aparat desa yang dapat mengoperasikan peralatan komputer tidak melebihi 15% dari jumlah total peralatan yang tersedia. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah pelatihan di bidang teknologi informasi, pembuatan perangkat lunak digitalisasi dokumen dengan nama SI-Dokdes dan mensosialisasikan peradaban desa.

Kata Kunci : digitalisasi desa, pelayanan publik, aplikasi desa, pkm

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah terkecil yang ada di Indonesia, menurut Kartohadikoesoemo S. (1984) mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintah dan pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Kegiatan desa yang sangat penting adalah pengadministrasian desa, hal ini sebagaimana Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa. Administrasi Pemerintahan Desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas pemerintah desa dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan desa, pemerintah desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register/model sesuai dengan urusan dan kepentingannya.

Kondisi yang terjadi di desa-desa pada umumnya dijumpai keadaan di bidang pengelolaan administrasi desa masih belum tertib dan kurang memadai, antara lain kegiatan laporan mengenai data penduduk tiap bulanya dan laporan tahunan semua buku register masih sering terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dan bahan tatacara pengisiannya pun belum dapat dikatakan sempurna. Selain itu yang terjadi desa pada umumnya kinerja pelayanan aparat desa saat ini belum memuaskan, sehingga seringkali menjadi bahan pembicaraan masyarakat seperti banyaknya kantor desa yang hanya melayani masyarakat setengah hari kerja, lamanya pengurusan dokumen yang dibutuhkan masyarakat akibat kurang profesionalnya sumber daya manusia aparat desa. Permasalahan tersebut penyebabnya salah satunya adalah relatif terbatasnya kapasitas sumber daya aparat dan perangkatnya, juga sumber daya pendukung berupa perangkat lunak dan perangkat keras.

Salah satu upaya yang harus dilakukan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan data dan informasi desa perlu dikembangkan suatu sistem manajemen desa yang merupakan salah satu bagian dari Sistem Informasi Manajemen Daerah secara bertahap dengan memanfaatkan kemampuan komputer untuk mengolah, menyimpan, menyajikan data dan

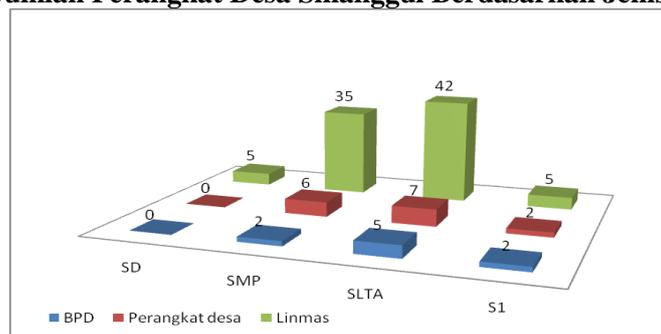
informasi. Sistem informasi administrasi desa digunakan sebagai sarana untuk data dasar bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti bidang kesehatan, program keluarga berencana, pendidikan, ketenagakerjaan, bidang sosial ekonomi, dan sebagainya.

Kondisi yang terjadi di desa yang ada di kabupaten Jepara tidak jauh beda dengan desa-desa yang ada pada umumnya dimana pengelolaan administrasi desa masih belum tertib dan kurang memadai, dikarenakan infrastruktur dan kinerja aparat desa saat ini belum memuaskan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan aparat desa yang ada rata – rata berpendidikan maksimal SLTP dan umur aparat desa rata-rata diatas 50 tahun.

Di kabupaten Jepara terdapat 196 desa/kelurahan dan 16 kecamatan. Pemilihan Mitra kegiatan Program Kemitraan Masyarakat berdasarkan persoalan masing-masing desa yang unik dimana mitra yang pertama adalah Desa Tahunan merupakan desa yang ada di dekat ibukota kabupaten dan terletak di sentra industri mebel, dan tergolong kriteria Lembaga Ketahanan Masyarakat Masyarakat Desa (LKMD) yang berkriteria maju dan mitra kedua adalah desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo yang merupakan desa yang ada di pinggir kabupaten Jepara yang kebanyakan masyarakatnya adalah petani, dan tergolong kriteria Lembaga Ketahanan Masyarakat Masyarakat Desa (LKMD) yang berkriteria berkembang.

Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, yang memiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 9 orang dan memiliki perangkat desa sebanyak 15 orang (1 petinggi dan 14 perangkat desa lainnya) dan memiliki Linmas sebanyak 87 orang.

Grafik 1. Jumlah Perangkat Desa Sinanggul Berdasarkan Jenis pendidikan

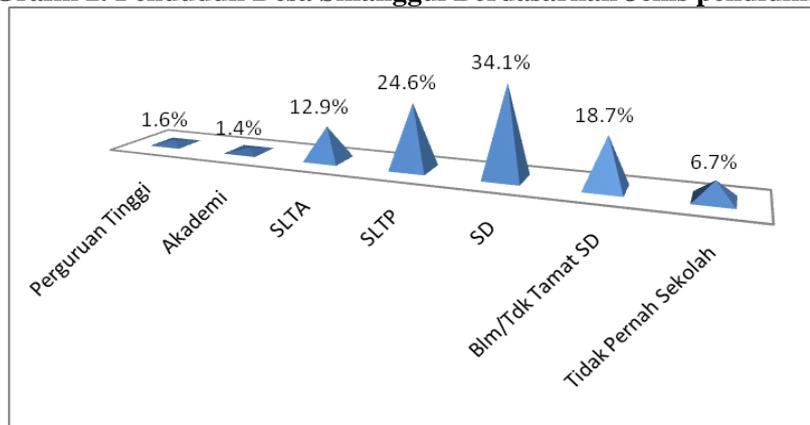


Sumber: Data Olahan monografi desa Sinanggul (2018)

Berdasarkan Grafik 1. Menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari perangkat desa yang paling banyak adalah masih pada tingkat SMP dan SLTA sehingga perlu adanya usaha yang keras bagi pemerintah daerah dan tim Iptek bagi Masyarakat (PKM) untuk memberikan pemahaman kaitanya dengan administrasi desa. Sehingga dengan pemahaman yang baik terhadap administrasi desa diharapkan adanya pelayanan yang baik pula terhadap masyarakat atau pihak yang membutuhkan pelayanan dari desa.

Sedangkan infrastruktur yang dimiliki oleh Desa sinanggul Kecamatan Pakisaji untuk mendukung pelayanan administrasi desa hanya ada 1 Set unit Komputer dan printer, dan yang bisa mengoperasikan komputer hanya satu orang saja. Sehingga kalau ada masyarakat yang menginginkan surat-surat di desa banyak maka tidak bisa di layani dalam waktu sehari.

Selain itu desa Sinanggul terdiri dari 45 Rukun Tetangga, 8 Rukun Warga dan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.183 KK dengan jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 12.875 jiwa, yang dirinci menurut kedewasaan dan anak-anak berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut: untuk katagori anak-anak jumlah laki-laki sebanyak 4.011 jiwa , untuk perempuan 3.925 jiwa. Sedangkan untuk katagori dewasa jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.520 jiwa dan untuk perempuan 2.371 jiwa. Degan luas wilayah 554 Ha (5,54 Km²) dan kepadatan penduduk per Km² 2,342 jiwa.

Grafik 2. Penduduk Desa Sinanggul Berdasarkan Jenis pendidikan

Sumber: Data Olahan Kecamatan Dalam Angka (2018)

Berdasarkan Grafik 2 di atas penduduk dan perangkat desa Sinanggul kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pendidikan dasar dan atas (SD sampai dengan SLTA) yaitu dengan Total 71,5%, yang paling besar adalah lulusan SD sebanyak 34,1% ini berarti akan mempengaruhi tingkat kesadaran, kepedulian terhadap sesuatu ketaatan terhadap peraturan masyarakatnya yang kurang. Jadi kesimpulan yang dihadapi oleh mitra tidak jauh beda dengan permasalahan, yaitu :

1. Adanya ketidak seimbangan antara jumlah perangkat dan jumlah penduduk yang ada di desa sinanggul dimana perbandingannya adalah 1:116 sehingga hal ini dibutuhkan suatu upaya terobosan untuk mensikapi ketidak seimbangan tersebut kaitanya dengan pelayanan administrasi terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah kabupaten Jepara.
2. Kemampuan sumber daya manusia perangkat desa Sinanggul yang sebagian besar berpendidikan SLTP/SMP dan SLTA/SMA, dan penduduk Desa Sinanggul kebanyakan berpendidikan SLTP ke bawah (SD, dan tidak tamat SD). Hal ini akan berakibat sulitnya memberikan pemahaman terhadap pentingnya administrasi, dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Dari sisi masyarakat yang latar pendidikan yang demikian mengakibatkan pola pikir mereka hanya menuntut untuk dilayani dengan baik tidak melihat keadaan dari perangkat desa.
3. Keterbatasan Infastruktur yang menunjang untuk melayani administrasi desa, baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan kepada pemerintah daerah kaitannya dengan permintaan data desa.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah tidak jauh beda yaitu jumlah perangkat desa yang ada di kedua mitra masih sangat terbatas hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di desa mitra kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) sehingga kalau tidak di imbangi dengan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai maka pelayanan terhadap masyarakat akan mengalami persoalan, sehingga dalam memberikan pelayanan administrasi dibutuhkan sebuah sistem informasi administrasi desa yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat agar efektif, efisien dan puas.

Selain itu juga kemampuan sumber daya manusia perangkat desa Sinanggul yang sebagian besar berpendidikan SLTP/SMP dan SLTA/SMA, dan penduduk Desa Sinanggul kebanyakan berpendidikan SLTP ke bawah (SD, dan tidak tamat SD). Hal ini akan berakibat sulitnya memberikan pemahaman terhadap pentingnya administrasi, dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Dari sisi masyarakat yang latar pendidikan yang demikian mengakibatkan pola pikir mereka hanya menuntut untuk dilayani dengan baik tidak melihat keadaan dari perangkat desa. Permasalahan yang lain adalah keterbatasan Infastruktur yang menunjang untuk melayani administrasi desa, baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan kepada pemerintah daerah kaitannya dengan permintaan data desa.

Masalah yang dihadapi oleh mitra berkaitan dengan pelayanan administrasi desa adalah keterbatasan jumlah aparat desa dengan penduduk dan keterbatasan Infra struktur yang berkaitan dengan pelayanan. Untuk mensikapi permasalahan mitra yang berkaitan dengan pelayanan

administrasi tersebut di atas, solusinya adalah dengan cara memberikan Iptek kepada mitra berupasisistem administrasi desa yang terpadu berbasis Teknologi Informasi Komputer.

Program ini diusulkan untuk mempermudah pelaksanaan administrasi desa dan pelaksanaan laporan di tempat mitra berada dimana administrasi desa akan lebih tertata dengan rapi sehingga pimpinan desa dalam memantau administrasi dengan mudah dan dalam pelaporan keuangan, pelaporan perkembangan desa yang tujuan untuk pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga pengelolaan tata pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Masalah yang dihadapi oleh kedua mitra berkaitan dengan tatakeloladan sistem manajemen pelayanan administrasi adalah meningkatkan kemampuan SDM dan belum adanya prosedur layanan.

METODE

Pelayanan Administrasi Desa

Dengan memberikan bantuan *Software* sistem administrasi desa yang terpadu berbasis Teknologi Informasi Komputer. Adapun tahapan pelaksanaan penyusunan *Software* sistem administrasi desa yang terpadu berbasis Teknologi Informasi Komputer adalah *Pertama* adalah mengidentifikasi seluruh kebutuhan data yang diperlukan dalam penyusunan software di setiap bagian yang ada di mitra. *Kedua*, Menyusun sistem atau software administrasi desa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam Mitra PKM dalam bentuk modul-modul dan modul tersebut disusun menjadi sebuah sistem administrasi desa.

Ketiga, Membuat buku manual sistem atau software administrasi desa yang terpadu. *Keempat*, Melakukan pelatihan operasional penggunaan *Software* bagi tenaga operator pelaksana sistem nantinya. *Kelima*; Melakukan sosialisasi terhadap seluruh bagian yang akan menggunakan sistem ini termasuk di dalamnya adalah kepala desa dan perangkat. *Keenam*, Penerapan dan pendampingan dalam menggunakan Sistem administrasi desa terpadu di tempat mitra.

Dalam penyusunan software ini mitra akan memberikan masukan kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan software tersebut. Sehingga harapannya software tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dari mitra PKM.

Adapun aplikasi Si-Dokdes yang dibangun meliputi konten 6 Aplikasi dengan 3 pilar pokok yang melekat padanya. diantaranya : a. Aplikasi data penduduk, b. Aplikasi administrasi desa, c. Aplikasi keuangan desa, d. Aplikasi data desa, e. Aplikasi data CMS (Content management Sistem) desa dan f. Aplikasi SMS desa. Dari ke-enam aplikasi di atas mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, permisalan satu aplikasi mempunyai banyak database yang saling terhubung. Sedangkan satu database di dalam aplikasi tersebut bisa digunakan oleh lebih dari satu aplikasi.

Aplikasi data penduduk

Aplikasi ini sebagai ujung tombak sistem informasi desa, terdapat dua kunci database yaitu berupa db keluarga dan db penduduk. Input data keluarga yang paling dasar diambilkan dari kartu keluarga yang telah ada, baru kemudian menambahkan data-data lain yang diperlukan. Setelah memasukkan data ini juga digunakan untuk memproduksi KK baru.

Analisis data dari tabel penduduk banyak kegunaannya, itulah yang mendasari pembuatan beberapa entitas tambahan seperti 1. Pendidikan sekarang dan pendidikan yang telah ditempuh, 2. Sakit menahun, 3. Jamkesmas, 4. Akseptor KB, 5. Cacat mental dan cacat fisik, 6. penduduk suku

Aplikasi administrasi desa

Aplikasi ini dapat disebut sebagai pelayanan surat-surat desa, bertugas sebagai pengelola layanan surat. Setiap warga yang akan mengurus surat tidak perlu lagi menunggu dalam waktu yang lama. Asalkan data penduduk sudah terekam dalam database, dapat dicetak langsung dari format surat yang telah ada.

Aplikasi keuangan desa

Aliran Kas desa, keuangan desa bersifat searah. Dana sisa dari tahun yang lalu dijadikan pokok rencana anggaran untuk bulan berikutnya. Setiap akhir bulan akan ada tutup realisasi bulanan. Dan setiap akhir tahun ada tutup realisasi tahunan. Pencatatan anggaran dana desa sudah termasuk anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran. Rekam anggaran dan rekam realisasi

ditempatkan pada database yang berbeda. Pada akhir bulan laporan aliran kas besar akan disamakan dengan anggaran dan realisasi keuangan hingga diperoleh sisa bulanan.

Aplikasi data desa

Data statis desa digunakan untuk memasukkan informasi statis yang melekat pada desa, berupa data desa, data dusun, RT, RW, pamong, kabag dan lembaga yang ada didalamnya. Berikut sub kelengkapan detailnya, Seperti: wilayah luasan, keadaan geografis, dll.

Aplikasi data CMS (Content Management Sistem) desa

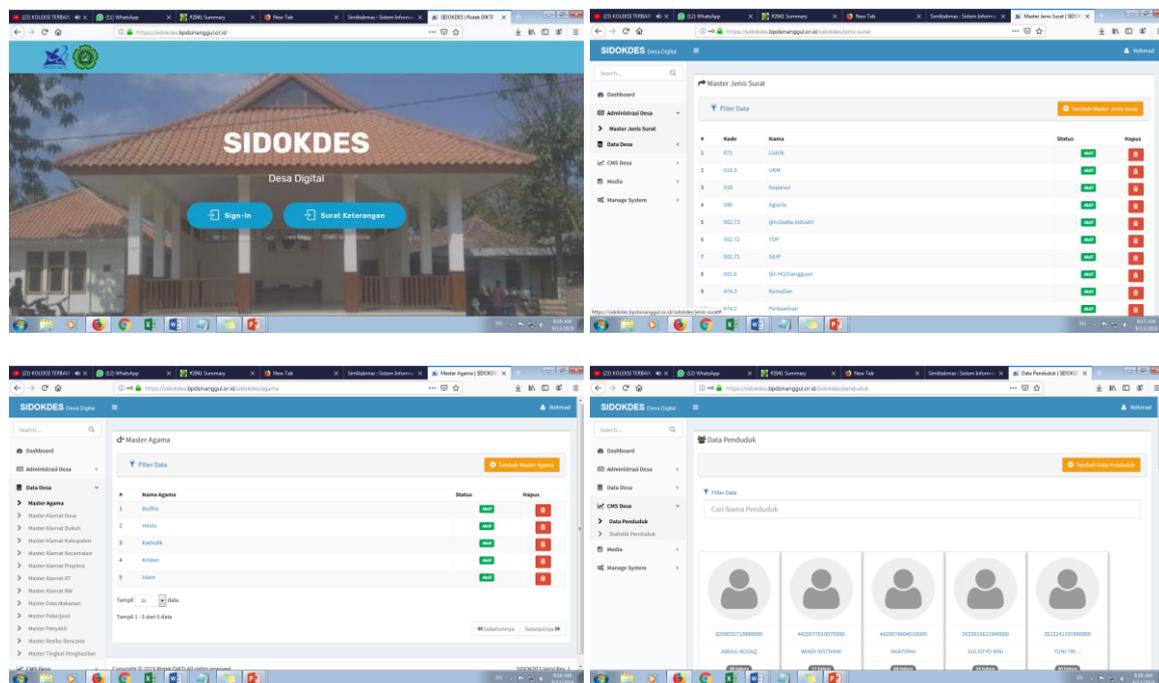
Manajemen konten pada website SID. Pada dasarnya ini digunakan untuk menampilkan data statistik desa berupa data chart, daftar rekam dari penduduk dan keluarga. Sebagai tambahan kelengkapan isi website ada konten dan kategori konten yang melekat untuk penulisan berita desa. Sebagai pengaturan web yang lain ditambahkan galeri foto dan event.

Aplikasi SMS desa

SMS gateway sistem IOD (Info on Demand), menerima sms dari penduduk pada nomor kartu aktif dengan format yang telah ditentukan. Sms tersebut dimasukkan kedalam database. Dalam database sms dapat dipetakan untuk balasan sms langsung dari template atau akan diabaikan. Pengorganisasian SMS desa untuk segala sisi keperluan desa.pun dengan mudah bisa menginformasikan pengumuman kepada warga lewat sms.

Tatakelola Dan sistem manajemen Pelayanan Administrasi

Untuk meningkatkan kemampuan SDM metode yang dipakai tim Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah dengan memberikan pelatihan manajemen tatakelola organisasi dan sekaligus melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan manajemen tatakelola. Sedangkan Untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat alur pelayanan harus ada dan jelas. Dari hasil pengamatan dan diskusi yang dilakukan Tim PKM dengan kedua Mitra memang belum ada informasi tentang prosedur layanan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut metode yang akan di lakukan Tim PKM akan membuat buku standar operasional prosedur (SOP).



Gambar 1. Tampilan dan Menu SiDokdes (sistem Informasi Dokumen Desa)

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan mitra dan metode pelaksanaan pengabdian kemitraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat pedesaan pada prinsipnya sudah cukup mampu untuk mengimplementasikan pelayanan berbasis teknologi informasi baik perangkat desa maupun masyarakatnya karena menjadi semakin mudah, efisien, transparan, akuntabilitas dan ramah lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Program Kemitraan Masyarakat terlaksana atas pendanaan dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019 serta dukungan dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisu) Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jepara. (2018). *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2018*. Jepara: Badan Pusat Statistik.
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.